

Kebijakan fiskal di Indonesia: Dampak dan tantangan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

Nevira Ayu Rihani

Program Studi Pendidikan ilmu pengetahuan sosial, Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang e-mail: neppicalista@gmail.com

Kata Kunci:

Media sosial, kesenian, budaya, gen z, Promosi

Keywords:

Social media, arts, culture, Gen Z, Promotion

ABSTRAK

Kebijakan fiskal di Indonesia memainkan peran penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui pengelolaan penerimaan negara, terutama dari pajak, serta alokasi belanja pemerintah untuk berbagai program pembangunan, kebijakan ini terus dioptimalkan. Pasca-pandemi COVID-19, pemerintah menyesuaikan pendekatan fiskal dengan meningkatkan investasi pada infrastruktur dan program sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi serta berbagai hambatan dalam penerapannya. Hasilnya menunjukkan bahwa

kebijakan fiskal ekspansif mampu mendorong pertumbuhan, namun tantangan seperti ketergantungan pada utang luar negeri dan pengelolaan anggaran yang kurang efisien masih menjadi kendala. Oleh karena itu, reformasi kebijakan fiskal yang lebih terstruktur dan berkelanjutan diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.

ABSTRACT

Fiscal policy in Indonesia plays a crucial role in achieving sustainable economic growth. This policy includes the regulation of state revenues through taxes and government expenditures for various development programs. In recent years, Indonesia has experienced significant changes in its fiscal policy, particularly in the context of post-COVID-19 economic recovery. This study aims to analyze the impact of fiscal policy on economic growth and the challenges faced in its implementation. The results indicate that expansive fiscal policy, especially in infrastructure spending and social programs, can drive economic growth. However, challenges such as reliance on foreign debt and inefficient budget management remain obstacles. This study recommends the need for more planned and sustainable fiscal policy reforms to ensure inclusive economic growth in Indonesia.

Pendahuluan

Kebijakan fiskal di Indonesia telah memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam beberapa tahun terakhir (Alamsyah & Sari, n.d.). Pemerintah secara aktif memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai alat utama untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi. Salah satu fokus utama kebijakan ini adalah belanja infrastruktur, dengan tujuan memperbaiki konektivitas, meningkatkan efisiensi logistik, dan memperkuat daya saing global. Pembangunan infrastruktur tidak hanya memacu aktivitas ekonomi dalam negeri, tetapi juga membuka peluang kerja baru, yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Meskipun kebijakan fiskal ekspansif memberikan manfaat, pelaksanaannya juga menghadapi tantangan besar. Salah satu kekhawatiran utama adalah tingginya ketergantungan pada utang luar negeri untuk menutup defisit anggaran. Walaupun utang dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk mendanai proyek-proyek besar, jika tidak dikelola secara efektif, hal ini bisa menimbulkan risiko bagi stabilitas makroekonomi dalam jangka panjang. Pengelolaan utang yang kurang efisien berpotensi mengganggu keseimbangan fiskal, terutama jika pertumbuhan ekonomi tidak cukup kuat untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang di masa mendatang.

Selain itu, pengelolaan anggaran yang kurang efisien menjadi masalah penting yang perlu diperhatikan. Sebagai contoh, meskipun alokasi anggaran besar diberikan untuk sektor-sektor tertentu, sering kali hasilnya tidak optimal akibat manajemen yang kurang efektif. Banyak program pembangunan terganggu oleh hambatan dalam pelaksanaan, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga atau kurangnya kapasitas teknis. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi struktural dalam pengelolaan keuangan negara agar kebijakan fiskal dapat lebih efektif mencapai target pertumbuhan yang berkelanjutan.

Peran dan Tantangan Kebijakan Fiskal dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia

Kebijakan fiskal adalah salah satu instrumen utama dalam pengelolaan ekonomi sebuah negara. Di Indonesia, kebijakan ini berperan penting dalam mencapai berbagai tujuan ekonomi seperti pertumbuhan berkelanjutan, stabilitas harga, dan pemerataan pendapatan. Kebijakan fiskal mencakup pengelolaan penerimaan negara, terutama melalui pajak, serta pengeluaran pemerintah untuk mendukung berbagai program pembangunan. Dalam hal ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai alat utama yang digunakan pemerintah untuk merencanakan dan menerapkan kebijakan fiskal. (Aji & Wijayanti, n.d.)

Sejak proklamasi kemerdekaan, kebijakan fiskal di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan penting. Awalnya, fokus utama kebijakan ini adalah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memulihkan ekonomi pasca-perang. Namun, dengan berjalannya waktu dan perubahan dalam dinamika ekonomi global, kebijakan fiskal Indonesia pun harus menyesuaikan diri dengan tantangan-tantangan baru.

Sebagai contoh, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada hampir seluruh sektor ekonomi. Pandemi Covid-19 telah memberi dampak melambatnya perkenomian nasional. Pada saat ini penanganan Pandemi Covid-19 telah menunjukkan hasil yang membaik. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk melakukan pemulihan khususnya bidang ekonomi yang terjadi akibat dampak Covid-19 (Sri Mulyani et al., 2022)

Pandemi ini memaksa pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan fiskal agar lebih fleksibel dan responsif. Berbagai stimulus ekonomi dikeluarkan untuk mendukung pemulihan, termasuk peningkatan belanja pada infrastruktur dan program sosial. Selain itu, pemerintah melonggarkan batas defisit anggaran guna memberikan ruang bagi peningkatan pengeluaran dalam upaya mengatasi dampak pandemi.

Meskipun kebijakan fiskal memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tantangan tetap ada. Ketergantungan pada utang luar negeri dan pengelolaan anggaran yang kurang efisien menjadi masalah yang harus diatasi oleh pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk terus melakukan evaluasi dan reformasi kebijakan fiskal guna mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang.

Dengan memahami konteks tersebut, artikel ini akan mengeksplorasi lebih lanjut dampak kebijakan fiskal di Indonesia serta tantangan-tantangan yang muncul dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran kebijakan fiskal dalam perekonomian Indonesia saat ini dan di masa mendatang (Sari et al., 2024).

Pembahasan

Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi terlihat langsung melalui peningkatan belanja publik dan pengaturan pajak. Ketika pemerintah meningkatkan investasi di sektor infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum, hal ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja selama proses konstruksi, tetapi juga meningkatkan produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Infrastruktur yang memadai memudahkan mobilitas barang dan jasa, menurunkan biaya transportasi, serta meningkatkan efisiensi.

Sebagai contoh, pembangunan jalan baru dapat mempercepat distribusi barang, memungkinkan pelaku usaha beroperasi lebih efisien dan mempercepat pengiriman produk ke pasar. Dampak kebijakan fiskal terhadap berbagai sektor di Indonesia juga menunjukkan kontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi. Dalam hal pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal memainkan peran kunci melalui pengelolaan anggaran belanja negara, yang diarahkan untuk memacu Produk Domestik Bruto (PDB). Misalnya, alokasi anggaran untuk sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menciptakan efek berantai yang meningkatkan output ekonomi secara keseluruhan. Data menunjukkan bahwa penerapan kebijakan fiskal yang tepat, seperti stimulus ekonomi selama pandemi COVID-19, berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% meskipun dunia mengalami perlambatan (Khasanah, n.d.).

Dalam hal menciptakan kesempatan kerja, kebijakan fiskal berperan penting dengan mendukung berbagai program padat karya dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah memanfaatkan anggaran negara untuk membiayai proyek infrastruktur yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama di wilayah pedesaan, sehingga secara signifikan membantu menekan angka pengangguran. Dalam hal pengembangan infrastruktur, kebijakan fiskal difokuskan pada pelaksanaan proyek strategis nasional seperti pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan sistem transportasi publik. Investasi ini tidak hanya memacu aktivitas ekonomi langsung melalui kegiatan konstruksi, tetapi juga memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan efisiensi logistik, serta menarik investasi dari dalam maupun luar negeri. Secara keseluruhan, kebijakan fiskal yang dirancang secara

matang mampu menciptakan sinergi untuk memperkuat fondasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan(Fakultas et al., n.d.).

Belanja Infrastruktur

Belanja infrastruktur merupakan salah satu komponen penting dalam kebijakan fiskal. Investasi dalam infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan:

1. Meningkatkan aksesibilitas: Mempermudah distribusi barang dan jasa.
2. Mendorong investasi swasta: Meningkatkan kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi.
3. Penciptaan Lapangan Kerja: Investasi pada proyek-proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan dan jembatan, secara langsung menciptakan lapangan kerja.
4. Dampak Multiplier: Belanja publik memiliki efek multiplier. Ketika pemerintah mengeluarkan dana untuk proyek infrastruktur, pekerja yang terlibat akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, yang kemudian mereka belanjakan di sektor lainnya. Hal ini menciptakan efek berantai yang mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.
5. Dengan usaha nirlaba, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan membantu komunitas lokal untuk mencapai keberlanjutan ekonomi yang lebih baik. Keseluruhan, usaha nirlaba memiliki peran strategis dalam mendorong perkembangan dan kemajuan UMKM, yang menjadi salah satu pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara (Khasanah et al., 2024).

Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak punya peran yang sangat penting dalam kebijakan fiskal karena menjadi sumber utama pendapatan negara untuk mendanai program-program penting seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Pajak juga membantu menstabilkan ekonomi dan mendukung pemerataan pendapatan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Namun, jika pajak yang ditetapkan terlalu tinggi tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, hal ini bisa mengurangi daya beli mereka. Ketika pajak naik, masyarakat mungkin kesulitan membeli kebutuhan sehari-hari, yang akhirnya bisa menurunkan permintaan dan berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi(Surjaningsih et al., 2012).

Karena itu, pemerintah harus bijak dalam mengelola kebijakan pajak. Perlu ada analisis mendalam terhadap kondisi ekonomi serta keseimbangan antara kebutuhan negara dan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. Kebijakan pajak juga harus fleksibel, sehingga bisa menyesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan pajak yang baik, stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bisa tetap terjaga.

Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi:

1. Ketergantungan pada Utang: Peningkatan utang luar negeri dapat menjadi beban bagi anggaran negara. Semakin banyak utang yang diambil, semakin sulit bagi pemerintah untuk mengelola keuangan dan memenuhi kewajiban pembayaran utang yang jatuh tempo.
2. Pengelolaan Anggaran yang Tidak Efisien: Banyak program pemerintah yang tidak berjalan dengan baik akibat kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Hal ini berarti dana yang dialokasikan untuk program-program tersebut tidak digunakan secara efektif, sehingga hasil yang diharapkan tidak tercapai.

Kesimpulan dan Saran

Kebijakan fiskal di Indonesia memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini mencakup tidak hanya pengelolaan penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Meskipun terdapat beberapa tantangan, seperti ketergantungan pada utang luar negeri dan pengelolaan anggaran yang kurang efisien, kebijakan fiskal tetap menjadi instrumen yang sangat penting. Salah satu masalah yang muncul adalah pengelolaan anggaran yang tidak efisien. Banyak program pemerintah tidak berjalan dengan baik karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal, pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran dialokasikan dengan benar dan diawasi secara ketat. Dengan meningkatkan transparansi, masyarakat dapat memahami bagaimana dana publik digunakan, sehingga mereka dapat memberikan masukan dan kritik yang konstruktif. Selain itu, pemerintah juga harus memprioritaskan investasi di sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan jangka panjang, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Dengan berinvestasi dalam bidang-bidang ini, pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Misalnya, pembangunan infrastruktur yang baik tidak hanya meningkatkan akses ke pasar, tetapi juga mempercepat distribusi barang dan jasa, yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan.

Diperlukan reformasi dalam kebijakan fiskal agar lebih terencana dan berkelanjutan. Pemerintah harus fokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta memprioritaskan investasi pada sektor-sektor strategis yang dapat mendorong pertumbuhan jangka panjang. Akuntabilitas juga harus ditingkatkan. Pemerintah perlu bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil terkait pengelolaan anggaran. Ini melibatkan penyediaan laporan yang jelas dan teratur mengenai hasil dari program-program yang didanai oleh anggaran serta penggunaan dana tersebut. Ketika masyarakat dapat melihat hasil nyata dari pengeluaran pemerintah, kepercayaan mereka terhadap kebijakan fiskal akan meningkat. Selain itu,

pemerintah perlu memprioritaskan investasi di sektor-sektor strategis yang memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang.

Sektor-sektor tersebut meliputi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Dengan berinvestasi di area-area ini, pemerintah tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur yang baik akan mempermudah akses ke pasar dan meningkatkan efisiensi dalam distribusi barang dan jasa. Dengan demikian, walaupun ada tantangan yang dihadapi, kebijakan fiskal tetap menjadi alat yang krusial bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui perbaikan dalam pengelolaan anggaran, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta investasi di sektor-sektor strategis, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan fiskal memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Aji, M. R. B., & Wijayanti, D. (n.d.). *Analisis Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*.
- Alamsyah, R., & Sari, S. D. M. (n.d.). *Analisis Perubahan Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*.
- Khasanah, U. (n.d.). *UMKM Pasca Covid, Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Global*. <http://repository.uin-malang.ac.id/15010/>
- Khasanah, U., Ch., M., Wicaksono, A. T. S., Dzirkullah, H. D., Amani, N. N., Moi, R. M., & Qurani, A. D. A. (2024). Membangun qaryah thayyibah: masyarakat berdaya bebas rentenir pasca pandemi covid-19. *RESONA : Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 8(1), 1. <http://repository.uin-malang.ac.id/19311/>
- Sari, F. M., Astuti, A., Zamanda, D., Restu, F. P., & Fadilla, A. (2024). Kebijakan Fiskal dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, 1(4), 1–10. <https://doi.org/10.47134/jeae.v1i4.231>
- Sri Mulyani, Munawar Ismail, & Aunur Rofiq. (2022). Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Pengembangan Sektor Industri Halal di Indonesia. *MALIA (TERAKREDITASI)*, 13(2), 167–180. <http://repository.uin-malang.ac.id/11269/>
- Surjaningsih, N., Utari, G. A. D., & Trisnanto, B. (2012). Dampak kebijakan fiskal terhadap output dan inflasi. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 14(4), 389–420. <https://doi.org/10.21098/bemp.v14i4.365>